



Pedagang Berharap Solusi Terbaik

■ Pemkot Yogya Segel Kompleks Pertokoan di Jalan Perwakilan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyetel kompleks pertokoan yang berada di Jalan Perwakilan, kawasan Malloboro. Para pedagang pun mempertanyakan penyelesaian tersebut.

Pantauan *Tribun Jogja*, sebuah teralis besi semi permanen berdiri di depan pertokoan Jalan Perwakilan, kawasan Malloboro Yogyakarta, Rabu (4/1). Di pintu toko-toko itu juga terdapat poster berlogo Pemkot Yogyakarta yang bertuliskan "Tidak Diperbolehkan Melakukan Aktivitas pada Bangunan di Atas Tanah Ini".

Beberapa ruko-ruko itu sudah mulai dikosongkan oleh pemiliknya. Tampak dari salah satu pekerja toko juga terlihat masih bersih-bersih ruangan toko yang berada di samping gedung DPRD DIY itu. Sementara lagi fasad pertokoan di Jalan Perwakilan itu akan berubah menjadi *Jogja Planning Gallery*.

Atas penyetelan ini, puluhan pedagang Jalan Perwakilan menyambangi Balai Kota Yogyakarta, Rabu (4/1) pagi. Kedatangan mereka kali ini membawa maksud untuk meminta kejelasan dari pihak eksekutif, terkait solusi atas upaya penyetelan yang dilakukan jajaran Pemkot terhadap lapak-lapak pedagang.

Sebagai informasi, pedagang di Jalan Perwakilan terkena dampak dari wacana Pemerintah DIY membangun JPG, yang direalisasikan di Gedung DPRD DIY, Rencananya, tempat berkantornya para wakil rakyat di tingkat provinsi itu, akan diubah sebagai ruang pentas seni sekaligus galeri.

Akan tetapi, niat hati untuk bertemu dan beraudien dengan Penjabat Wali Kota Yogyakarta harus kandas, lantaran yang bersangkutan ternyata tidak berada di lokasi. Dalam kesempatan itu, para pedagang hanya ditemui oleh Kabid Keterlibatan Masyarakat Saipol PP, Ricardo Putro Mukti.

"Jadi, hari ini (kemarin) sebenarnya kami diundang,

SEGERA RELOKASI

- Pemkot Yogyakarta menyetel kompleks pertokoan yang berada di Jalan Perwakilan, kawasan Malloboro.
- Para pedagang pun mempertanyakan penyelesaian tersebut.
- Fasad pertokoan di Jalan Perwakilan itu akan berubah menjadi *Jogja Planning Gallery*.
- Pemda DIY akan segera membongkar kompleks pertokoan yang dinilai ilegal ini.

kami sudah diagendakan audiensi jam 10.00 di Pemkot, bertemu Pak Pj (Wali Kota). Tapi, entah kenapa, sampai di sini kami tidak ditemui dan mereka bilang belum siap," ujar Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP), Adi Kusuma Putra Suryawan, di Balai Kota.

Karena itu, keluhnya, para pedagang akhirnya pulang dengan tangan hampa, tanpa membawa solusi pasti dari Pemkot Yogyakarta. Ia menyebut, selama ini dari pihak eksekutif sama sekali belum memberi tawaran apapun kepada para pedagang, mengenai tempat relokasi setelah pengurusan diwacanakan.

"Kami tidak menolak, di sini selalu tidak menolak, ya. Kami membuka dialog, untuk mencari *win win solution*, untuk pemerintah dan untuk kami. Tapi, yang terjadi adalah penyetelan. Surat edaran pagi kami terima pagi, dini hari langsung disegel," ujarnya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, mengungkapkan wacana relokasi pedagang di Jalan Perwakilan menuju lantai tiga Pasar Beringharjo dan Pasar Pratiwotaman. Meski demikian Adi memastikan, rencana itu sama sekali belum pernah ditawarkan pada pedagang yang menginginkan solusi.

"Itu yang kami sayangkan, sampai sekarang ini kita belum pernah membahas soal relokasi, kok bisa Pak Pj di

media ada kata-kata seperti itu. Kita belum pernah diajak rancangan sama sekali," terangnya.

Padahal, seandainya tawaran tersebut disampaikan, pedagang pun tentu bersedia mempertimbangkannya, untuk direlokasi ke titik yang ditawarkan. Karenanya, ia berharap, Pemkot Yogyakarta bisa segera memberikan solusi, menginget perduk nasi benar-benar terganggu setelah lapak-lapaknya disegel eksekutif.

"Kami sudah kehilangan mata-pencabaran, sebisa mungkin segera diberikan solusi. Kalau terlalu lama, ya, kami akan buka, apapun risikonya, karena kami menanggung banyak karyawan juga," jelasnya.

Salah seorang pedagang di Jalan Perwakilan bernama Rukamio mengklaim Pemkot Yogyakarta melalui Disperairu Kota Yogyakarta belum menemukan solusi untuk relokasi. "Kalau mau dipindah ke mana SOP enggak jelas baru tadi menerbitkan SOP-nya dari pihak pemkot dengan jajaran tahu-tahu udah shock terapi," jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah DIY akan segera membongkar bangunan yang berada di sisi utara Jalan Perwakilan kawasan Malloboro usai Pemerintah Kota Yogyakarta menyetel bangunan pertokoan di kawasan tersebut.

"Jalah kita lakukan secepatnya, lya (pembongkaran dilakukan) bulan ini," kata Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji saat ditemui di kantornya.

Aji menegaskan bahwa bangunan maupun lahan di sisi utara Jalan Perwakilan tersebut dimiliki Keraton Yogyakarta dan berstatus sebagai Tanah Kasultanan atau *Sultan Ground*. Sehingga pedagang yang melakukan aktivitas bisnis di kawasan itu sebenarnya ilegal karena pihak Keraton tidak menerbitkan surat kecakangan.

"Itu kan punyanya Keraton, baik bangunan maupun tanahnya. Tentu nanti kita akan sepepetujuan keraton untuk memanfaatkan tanah itu," jelasnya. (aka/hda/tro)



PAGAR PEMBATA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memasang pagar di depan pertokoan Jalan Perwakilan, Rabu (4/1). Penyetelan ini mengundang reaksi dari sejumlah pedagang di kawasan tersebut.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005